

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam melaksanakan pembangunan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan memperluas pemerintahan daerah merupakan wewenang dari pemerintah daerah. Sebagai pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan mengelola keuangan publik, pemerintah bertanggungjawab atas transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai situasi, terutama dalam masalah keuangan yang sangat sensitif. Namun ada banyak situasi di mana pemerintah menjadi lebih tanggap terhadap kebutuhan individu dan kelompok, sehingga berujung pada tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah, BPK Jawa Timur menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan terkait ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan pemerintah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah diharapkan mematuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menjadi pedoman untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. SAP memiliki peran penting dalam pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Standar ini menekankan pada beberapa elemen, seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Adanya kepatuhan terhadap SAP diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah

daerah. Langkah-langkah ini diperlukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan informasi keuangan pemerintah daerah. Dengan mematuhi SAP, pemerintah daerah dapat meminimalkan potensi masalah ketidakpatuhan sehingga dapat mendukung upaya peningkatan pengungkapan laporan keuangan yang efektif dan efisien di tingkat daerah.

Menurut (PP Nomor 71, 2010), setiap pemerintah daerah wajib melakukan proses pengungkapan informasi secara menyeluruh. (Priharjanto & Wardani, 2017) Dalam laporan keuangan, pengungkapan ada dua macam, yaitu pengungkapan yang dilakukan secara sukarela dan yang bersifat wajib. Pengungkapan sukarela adalah ketika suatu entitas menyediakan informasi tambahan secara inisiatif dengan tujuan memberikan pengguna laporan keuangan informasi yang lebih lengkap. Sementara itu, pengungkapan wajib adalah informasi yang harus disajikan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku oleh pihak yang berwenang.

Pengungkapan wajib yang disajikan harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks laporan keuangan pemerintah, standar yang dimaksud adalah pengungkapan minimum yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 sebagaimana disyaratkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Dalam hal ini pemeriksaan BPK dilakukan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran informasi yang diberikan. Hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana dinyatakan dalam (UU Nomor 15, 2006) harus disampaikan kepada berbagai lembaga perwakilan seperti DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Lembaga-lembaga ini kemudian akan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur prosedur mereka, dan hasil pemeriksaan tersebut juga akan diumumkan secara terbuka.

Namun, pertanyaannya adalah apakah informasi yang terdapat dalam laporan keuangan sudah mencakup seluruh aspek dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini diperkuat oleh sejumlah peneliti yang mencatat bahwa tingkat keterbukaan dalam laporan keuangan pemerintah daerah masih cenderung rendah yaitu, 26,48% (Herawati, 2018), 39,9% (W. Putri & Arza, 2019), 60,42% (Utami & Sulardi, 2020), dan 38,99% (Teriyani et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya melaksanakan tanggungjawabnya dalam mengungkapkan laporan keuangannya secara transparan. Sesuai dengan teori agensi, dimana pemerintah harus diawasi untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaian peraturan yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa variabel yang diduga memiliki dampak adalah tingkat kemandirian pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah, total aset, dan umur pemerintah daerah. Tingkat kemandirian daerah yang tinggi dapat mengurangi terjadinya kesalahan dalam penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Herawati, 2018). (Rahim et al., 2020), (Chairani et al., 2021), dan (Finakesti et al., 2022), mendapati bahwa tingkat kemandirian pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Utami & Sulardi, 2020) menyimpulkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Kekayaan pemerintah daerah merujuk pada pendapatan asli pemerintah daerah yang diperoleh dari sumber daya yang dimiliki oleh suatu pemerintahan.

(Setyaningrum & Syafitri, 2012) Pemerintah yang memiliki PAD besar akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, sehingga mengakibatkan pemerintah merasa mendorong untuk melakukan pengungkapan laporan keuangannya secara lengkap dan transparan. (Kurniawati et al., 2020) dan (Primadiva et al., 2021) tingkat kekayaan pemerintah memiliki pengaruh terhadap tingkat keterbukaan laporan keuangan pemerintah daerah. Perspektif ini berbeda dengan temuan yang disampaikan oleh (Merliani et al., 2018) dan (Haryanto et al., 2023) menyatakan bahwa tingkat kekayaan pemerintah daerah tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Aset merupakan total sumber daya yang dimiliki suatu entitas guna melaksanakan aktivitas operasional entitas tersebut. Semakin banyak aset yang dikelola pemerintah daerah, maka dapat meningkatkan risiko pada pengungkapan keuangan, yang berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan (A. N. Putri et al., 2023). Hal ini didukung oleh (Merliani et al., 2018) dan (Haryanto et al., 2023) yang menemukan bahwa total aset memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, hasil penelitian oleh (Rahim et al., 2020) menyatakan bahwa total aset tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Umur pemerintah daerah merujuk pada lamanya masa pemerintahan tersebut sudah berjalan. Semakin lama suatu pemerintahan berlangsung, hal tersebut juga akan berdampak pada kualitas pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan pengalaman pada pemerintahan tersebut (Widanti, 2019). (Narulitasari & Zafira, 2021) menemukan bahwa umur pemerintah memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Namun, pandangan yang berbeda diungkapkan oleh (Budiarto & Indarti, 2019) yang menyatakan bahwa umur pemerintah daerah tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, terutama di tingkat kabupaten/kota. Dalam penelitian ini, ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena melibatkan empat variabel independen sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib pelaporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Variabel-variabel tersebut mencakup kemandirian pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, total aset daerah, dan umur pemerintah daerah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020-2022 yang melibatkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Laporan keuangan yang dimaksud adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kemandirian pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah total aset daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah?

4. Apakah umur pemerintah daerah positif berpengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disajikan, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji apakah variabel-variabel seperti Kemandirian Pemerintah Daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah, Total Aset Daerah, dan Umur Pemerintah Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten/kota di Jawa Timur tahun periode 2020-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian yang dilakukan ini dapat mengembangkan pemahaman ilmiah peneliti lebih dalam. Selama proses penelitian, peneliti akan memperoleh pengetahuan berharga yang dapat digunakan dalam pengembangan akademik selama pembelajaran. Dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah, peneliti akan memperoleh wawasan yang lebih mendalam terkait topik penelitian ini.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi literatur ilmiah dan menjadi sumber referensi yang berguna bagi para akademisi dan peneliti di masa depan yang tertarik untuk mengeksplorasi permasalahan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini bisa menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dan pemahaman yang lebih mendalam di bidang ini.

3. Bagi Instansi Publik

Penelitian ini berpotensi memberikan manfaat kepada otoritas publik terkait dengan publikasi laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Temuan dan hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan proses keterbukaan dan meningkatkan tingkat transparansi laporan keuangan di tingkat daerah.

